

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam keseluruhan lingkaran sejarah Indonesia, dibandingkan dengan rezim-rezim sebelum dan sesudahnya, Orde Baru merepresentasikan suatu rezim negara yang otoriter.<sup>1</sup> Pada masa kuasanya, di Indonesia, jarang terjadi konflik-konflik sosial, termasuk konflik agama, yang bersekalanya *masive*. Kalau pun ada, jumlahnya sangat sedikit, dengan kadar dan kualitas yang terhitung biasa-biasa saja, dan segera bisa diselesaikan dengan kekuatan tangan besinya. Akan tetapi, dengan munculnya krisis moneter global (*global monetary crisis*) di akhir era 1990an, secara langsung merubah tatanan dunia (*world order*) yang diiringi pula dengan melemahnya kuasa rezim Orde Baru tersebut. Kekuasaan yang dulu mutlak berada di tangan negara berpindah ke tangan rakyat. Ada pergeseran kekuasaan dari Jakarta ke daerah. Situasi dan kondisi ini secara langsung mendorong muncul dan menguatnya agregasi identitas komunal<sup>2</sup> di ruang publik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Untuk informasi lebih detail seputar klaim tersebut, lihat Nicholas Tarling, *Nations and States in South-East Asia* (New York: Cambridge University Press, 1998); Craig Baxter, *Government and Politics in South Asia* (Colorado: West View Press, 1998); Richard Higgot and Richard Robinson (eds.), *South-East Asia: Essay in the Political Economy of Structural Change*, (London: Routledge, 1985).

<sup>2</sup>Secara umum, identitas dipahami sebagai suatu bentuk kesadaran seputar batas-batas ke-diri-an (*self unity*) dan kelangsungannya (*continuity*) dalam menjaga makna masa lalu tentang diri (*self*) dan yang lain (*other*). Keduanya—*self unity* dan *continuity*—mengintegrasikan seluruh gambaran tentang diri (*self-images*) baik yang dibentuk (*constructed*) oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Untuk informasi lebih detail seputar identitas dan konstruksi identitas, baca Michel A. Hogg and Dominic Abram, *Social Identification: A social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes* (London: Routledge, 1988); Gordon Matthews, *Global Culture/Individual Identity: Searching for Home in the Cultural Supermarket* (London and New York: Routledge, 2000); George J. McCall and J.L. Simons, *Identities and Interaction* (New York: Free Press, 1978); Sheldon Stryker, *Symbolic Interaction: A Social Structural Version* (Menlo Park: Benjamin Cummings, 1980).

<sup>3</sup>Muhammad Iqbal Ahnaf, *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia* (Yogyakarta: Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Universitas Gadjah Mada (UGM), 2015), 121-123.

Melemahnya kuasa rezim Orde Baru tersebut secara langsung menstimulasi muncul dan menguatnya identitas-identitas komunal yang pada akhirnya secara langsung menciptakan ruang-ruang kontestasi dalam memperebutkan kendali-kontrol atas ruang publik (*public sphere*). Dikatakan kontestasi, sedikitnya karena dua alasan. Pertama, adanya penggunaan kaidah-kaidah demokrasi dalam kontestasi tersebut. Situasi ini berbeda secara signifikan dengan sebelumnya yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan (*coercive*). Alasan kedua, ada usaha negosiasi ulang terkait dengan batas-batas (*renegotiating boundaries*) antar-kekuatan-kekuatan sosial politik. Negosiasi-negosiasi tersebut mendasarkannya pada persoalan klaim mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas tidak jarang beranggapan mempunyai hak supremasi (*supreme*) dalam menetapkan aturan tertentu. Bentuk nyata dari usaha negosiasi itu adalah menguatnya klaim tertentu atas daerah tertentu dengan identitas tertentu pula, identitas agama misalnya. Papua Barat diklaim sebagai teritori Kristen, Bali dengan Hindu, dan Aceh sebagai teritori Islam.<sup>4</sup>

Konsentrasi utama dalam kajian isu identitas adalah seputar *agency* dan praktiknya, bukan pada aspek teologinya. Perbedaan identitas agama yang dimiliki setiap individu tidak akan melahirkan persoalan. Sebaliknya, akan menjadi persoalan ketika identitas agama tersebut berada pada ruang publik dan dijadikan justifikasi untuk usaha-usaha yang berorientasi pada klaim atas status superioritas-imperioritas identitas agama tertentu.<sup>5</sup> Agama tidak jarang juga terlibat, kadang-kadang bersifat kompetitif dan tidak sedikit pula komplemen, dalam proses-proses penguatan identitas individual maupun komunal. Agama dan identitas etnis juga sering tidak selaras (*dissociated*) dengan dunia modern sekarang ini. Dalam kasus-kasus tertentu, kasus pembunuhan masal antar etnis di Libanon tempo silam adalah salah satu contoh yang cukup dramatis. Sementara dalam kasus lain, komunitas berbeda agama bisa hidup rukun bersama pada wilayah etnik tertentu. Agama, faktanya, merupakan sentra dari

---

<sup>4</sup>Ahnaf, *Praktik Pengelolaan Keragaman*, 122.

<sup>5</sup>Bagir dkk., *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman*, 22.

identitas-identitas etnik, dan tidak untuk yang lainnya. Etnik Melayu dengan etnik Cina di Malaysia dapat dibedakan dalam hal agama. Agama Islam merupakan bagian penting dalam konstruk identitas Melayu. Sebaliknya, agama tidak begitu relevan dalam konstruk identitas etnis komunitas Cina.<sup>6</sup>

Hal senada diungkap juga oleh Michel Picard ketika meneliti identitas masyarakat Bali. Hasil penelitian Picard ini selanjutnya diterbitkan dan diberi judul *Cultural Tourism, Nation Building, and Regional Culture: The Making of a Balinese Identity*. Dari hasil penelitiannya, Picard meyakini bahwa persoalan agama merupakan faktor yang bersifat komplemen-fundamental dari konstruksi identitas masyarakat Bali secara keseluruhan. Ini artinya, agama merupakan elemen penting yang terlibat secara langsung dalam proses-proses konstruksi identitas masyarakat Bali.<sup>7</sup> Selanjutnya, Picard menegaskan:

... kesatuan agama, adat, dan seni maupun budaya yang konon bersifat mutlak dan primordial, yang dengannya masyarakat Bali sekarang ini mendefinisikan identitas diri mereka, merupakan hasil dari sebuah proses-proses peminjaman semantik dan proses-proses pemingkakan kembali konsep-konsep sebagai tanggapan atas kolonialisasi, Indonesiasi, maupun turisifikasi wilayah/pulau mereka.<sup>8</sup>

Identitas pada hakikatnya merupakan entitas yang bersifat tidak berdiri sendiri (*dependent*) dan tidak juga terberikan atau terwariskan (*given*). Tetapi justru sebaliknya, identitas sengaja dibentuk (*formed*), dibangun (*constructed*), dipilih (*chosen*), atau diseleksi (*selected*) dari proses-proses negosiasi. Dengan kata lain, identitas pada dasarnya merupakan bagian dari proses-proses dialektika antara konteks sejarah dengan *construct* itu sendiri dan merupakan hasil dari proses-proses negosiasi diri (*the self*) dengan yang lian (*the others*). Sehingga, persoalan identitas tidak terbatas hanya pada persoalan *root* semata, namun lebih merupakan *routes*.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Ratna Smith Kipp, *Disassociated Identities: Ethnicity, Religion, and Class in Indonesian Society* (the USA, the University Of Michigan Press, 1993), 77.

<sup>7</sup>Michel Picard and Robert E. Wood (eds.), *Tourism, Ethnicity, and State in Asian and Pacific Society* (Honolulu, University of Hawai Press, 1997), 185.

<sup>8</sup>Picard and Robert E. Wood (eds.), *Tourism, Ethnicity, and State*, 185.

<sup>9</sup>Informasi lebih luas seputar isu tersebut, lihat Ratna Smith Kipp, *Disassociated Identities: Ethnicity, Religion, and Class in Indonesian Society* (Michigan: the University of

Identitas tertentu juga terbentuk dalam hubungannya dengan identitas tertentu pula. Terkait dengan persoalan ini, Hylland Eriksen dalam karya akademiknya *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives* menulis:

... [identitas] kelompok-kelompok dan kolektifitas-kolektifitas tertentu terbentuk dalam hubungannya dengan sejumlah *the others*. Identitas bersama bangsa Eropa, misalnya, selalu mendefinisikan dirinya berbeda dengan identitas Muslim, Timur Tengah, atau Arab, mungkin juga dalam hubungannya dengan identitas masyarakat Afrika, Asia Timur, dan Amerika Utara—tergantungan pada situasi sosialnya.<sup>10</sup>

Di samping itu, fenomena runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan bubarnya Uni Soviet dimaknai oleh Francis Fukuyama (1992) sebagai *the end of history*. Sementara, oleh masyarakat dunia dianggap sebagai tahapan-tahapan terwujudnya atmosfer demokratisasi di seluruh belahan dunia.<sup>11</sup> Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, fenomena dunia menunjukkan hal yang berbeda: perang dan pembantaian etnis maupun agama terjadi di mana-mana di belahan dunia. Yang mengejutkan lagi adalah munculnya ikatan-ikatan identitas primordial yang berafiliasi pada etnik, ideologi, dan agama tertentu semakin mewarnai dunia saat itu. Kebencian antar-umat beragama maupun suku berbeda menjadi pemandangan biasa pada masa itu. Dari situasi semacam ini, pada akhirnya, kajian-kajian seputar identitas menjadi hidup dan diminati kembali.<sup>12</sup>

Menguatnya konflik-konflik sosial yang akarnya pada etnisitas, ideologi, atau agama, seperti telah disebut di atas, merupakan salah satu tema yang masih cukup *sexy* dalam kajian identitas. Di samping itu juga, dianggap belum tuntas dan masih meninggalkan persoalan yang cukup serius. Hal tersebut terlihat pada

---

Michigan Press, 1993); Jeol S. Kahn, *Constituting the Minangkabau: Peasant, Culture, and Modernity in Colonial Indonesia* (Oxford: Berg, 1993); Hylland Eriksen, *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives* (Colorado: Pluto Press, 1993); Basam Tibbi, *Islam Between Culture and Politics* (New York: Pilgrave Press, 2001).

<sup>10</sup>Hylland Eriksen, *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives* (Colorado: Pluto Press, 1993), 62.

<sup>11</sup>Untuk mendapatkan informasi lebih terperinci seputar topik ini baca Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York and London: Penguin book, 1992).

<sup>12</sup>Selanjutnya, lihat J. Peter Euben, *The Tragedy of Political Theory: the Road not Taken* (New Jersey: Princeton University Press, 1990); Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship* (New York: Oxford University Press, 1995).

tingkat konseptual yang masih terus diperdebatkan sampai saat ini. Pertanyaan dasar seputar apakah agama dan identitas berada pada posisi yang sama? Dengan kata lain, apakah agama dapat dipandang juga sebagai identitas, atau sebaliknya. Betul, oleh sebagian pengkaji agama maupun identitas, agama tidak saja dilihat sebagai bentuk kepercayaan semata, namun beragam: budaya, identitas, kelompok, dan sebutan-sebutan lainnya.<sup>13</sup> Sehingga, pengkaji identitas secara khusus memberi perhatian pula terhadap tema-tema politik identitas.

Dalam konteks Indonesia yang plural, politik identitas bermuara pada dua hal berikut. *Pertama*, identitas pada dasarnya bersifat kompleks dan tidak statis. Sehingga, politik identitas akan menjadi produktif ketika posisinya sebagai stimulan dalam proses-proses penyadaran atas keanekaragaman (*multiculturalism*), terlebih keragaman agama. *Kedua*, politik identitas akan menjadi tidak produktif ketika ada tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap individu maupun kelompok tertentu. Demikian pula tidak semua gerakan agama bisa dikategorikan sebagai bentuk artikulasi dari politik identitas. Ada indikator tertentu apakah suatu gerakan masuk dalam kategori politik identitas atau tidak: ada sejarah penggunaan tindakan represif, adanya perlakuan diskriminasi, dan pemakaian identitas tertentu sebagai basis klaimnya.<sup>14</sup>

Keberpihakan negara terhadap agama tertentu sudah ada sejak masa kolonial Belanda yang walaupun secara eksplisit menyatakan netral terhadap urusan agama. Pada kenyataannya, agama Kristen yang merupakan agama yang dibawa oleh kolonial Belanda mendapatkan subsidi lebih besar dibanding dengan yang lain. Subsidi dari tahun 1936-1939 untuk tiga agama besar di Indonesia tercatat: Kristen Rp. 2.909.400, Katolik, Rp. 1.212.300, dan Islam Rp. 301.000.<sup>15</sup> Hampir seluruh kebijakan agama pada masa itu dibuat untuk

---

<sup>13</sup>Bagir dkk., *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman*, 21.

<sup>14</sup>Bagir dkk., *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman*, 20.

<sup>15</sup>Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan dan Sosial (LP3ES), 1985), 26. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi seputar isu ini, baca MC. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c. 1200* (California: Stanford University Press, 2001); Nicholas Tarling (Ed.), *The Cambridge History of Southeast Asia: The Nineteenth and Twentieth Centuries* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).

menyokong kepentingan politik pemerintah kolonial yang pada satu waktu memberi perhatian lebih pada agama tertentu dan, sebaliknya, memarginalkan yang lain.<sup>16</sup>

Demikian pula ketidaknetralan sikap pemerintah tersebut berlaku juga pada penghayat agama-agama lokal. Hal tersebut teridentifikasi salah satunya dari penyebutan: Agama Suku, Agama Asli, Agama Pribumi, Agama Nusantara, dan sebagian lagi menggunakan istilah Aliran Kebatinan. Penyebutan yang beragam itu tidak begitu saja lahir di ruang hampa, namun dari proses-proses negosiasi dan tarik-ulur terkait dengan usaha marginalisasi terhadap penghayat agama-agama lokal dalam mendefinisikan posisinya di tengah pergaulannya dengan agama-agama besar.

Tema penelitian seputar agama lokal dengan berbagai perspektifnya bagi banyak peneliti masih cukup menarik. Hal itu bisa jadi didasari beberapa alasan. Pertama, dari aspek kuantitas, jumlah penganut agama lokal di seluruh dunia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hasil penelitian David Barret dan Todd Johnson yang diterbitkan pada jurnal *International Bulletin of Missionary Research* menyebutkan bahwa pada tahun 2003 jumlah penganut agama lokal di dunia diperkirakan mencapai 237.386.000 orang. Angka tersebut sepadan dengan 3.78 persen dari total jumlah penduduk dunia yang mencapai angka 6.3 miliar.<sup>17</sup>

Kedua, penghayat agama lokal sering menampilkan perilaku dan pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan penganut agama-agama besar. Sehingga, performens mereka tidak jarang dianggap *nyleneh*, menyimpang, atau sesat sekalipun. Di samping itu juga, identitas agama lokal masih sering digunakan dalam praktik-praktik keagamaan bangsa Indonesia. Ketiga, walaupun keberadaan agama-agama lokal di bumi Nusantara ini mendapat

---

<sup>16</sup>Suminto, *Politik Islam Hindia*, 35-37.

<sup>17</sup>David Barret dan Todd Johnson. 'Annual Statistical Table on Global Mission,' *International Bulletin of Missionary Research*, vol. 27 No. 1, (2003): 25.

tekanan yang begitu kuat, namun keberadaan, atribut, dan bahkan identitasnya masih tetap eksis dan terpelihara dengan baik sampai pada saat sekarang ini.<sup>18</sup>

Ketika rezim Orde Baru berkuasa, ada kecenderungan seperti oleh Casanova istilahkan dengan deprivatisasi (*deprivatitation*) agama. Melalui kebijakan agama rezim Orde Baru berusaha meminggirkan peran agama dari urusan publik. Hal tersebut terlihat dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 14 tahun 1967 yang mengatur kehidupan agama, kepercayaan, dan adat istiadat masyarakat Cina. Meskipun Inpres itu tidak secara eksplisit menyebut agama, yang terkena dampaknya secara langsung adalah agama-agama lokal.<sup>19</sup> Secara redaksional, kata *kepercayaan* posisinya berada<sup>20</sup> langsung setelah kata *agama*. Sehingga, bagi kalangan penganut agama lokal, redaksi itu dipahami sebagai bentuk kesetaraan baik dalam kelembagaan maupun kepercayaan dan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan agama lokal.

Penghayat agama lokal, pada masa awal kuasa Orde Baru, dihadapkan pada dua pilihan yang dua-duanya dilematis: masuk ke agama resmi atau dihukum dengan tuduhan komunis yang anti agama. Dalam situasi yang secara psikologis tidak menentu itu terjadi gelombang konversi secara besar-besaran dari agama-agama lokal ke agama-agama negara. Perlakuan agama negara terhadap agama lokal yang diskriminatif itu berlangsung sampai pada rezim pasca Orde Baru. Dalam pidatonya pada Perayaan Hari Imlek Nasional tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan sangat jelas mengatakakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Statemen SBY itu mendasarkannya pada Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 dan yang telah diundangkan oleh Undang-undang No. 5 tahun 1969.

---

<sup>18</sup>Kiki Muhamad Hakiki, 'Politik Identitas Agama Lokal: Studi Kasus Aliran Kebatinan,' *Analisis*, Volume XI, Nomor 1 (2011): 161.

<sup>19</sup>Rumadi, *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP* (Jakarta: the Wahid Institute, 2007), 6-8.

<sup>20</sup>Redaksi urutannya persis seperti dalam Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945 pada pasal 29 ayat 2 secara terang benderang muncul kata 'kepercayaan' yang berdampingan juga dengan kata 'agama.'

Berikut penggalan teks lengkapnya yang SBY katakan di depan ratusan hadirin pada acara Perayaan Hari Imlek Nasional tahun 2006:

Hadirin yang saya mulia ...  
Kesempatan yang baik pada sore hari ini, saya ingin menegaskan sekali pernyataan saya dalam Perayaan Imlek tahun lalu, mengenai status agama Konghuchu, seperti yang saya katakan tahun yang lalu, pemerintah mengacu pada Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965, yang telah diundangkan oleh Undang-undang No. 5 tahun 1969. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu adalah agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia.<sup>21</sup>

Fenomena lain yang muncul di akhir masa kuasa rezim Orde Baru adalah lahir dan menguatnya gerakan keagamaan<sup>22</sup> dengan berbagai model dan orientasi gerakannya. Model dan orientasi tersebut berlaku untuk keseluruhan bentuk dan respon yang bersifat resisten terhadap *mainstream* dan kemapanan pandangan. Biasanya, agama-agama lokal lebih memilih ranah kultur sebagai representasi *locus* gerakannya dibanding ranah politik.<sup>23</sup> Salah satu agama lokal yang lahir di akhir masa kuasa rezim Orde Baru adalah Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bhumi Seghandu Indramayu.<sup>24</sup> Di masa awal kelahirannya,

---

<sup>21</sup>Disampaikan pada Hari Perayaan Hari Imlek Nasional ke 2557 tahun 2006, bertempat di Jakarta Convesion Center (JCC), dan pada Hari Sabtu, tanggal 4 Pebruari tahun 2006. Dikutip dari situs resmi kepresidenan.

<sup>22</sup>Sengaja menggunakan terminologi *fundamentalisme agama* untuk menunjuk fenomena menjamurnya agama-agama lokal, baik itu yang bersifat *renewal* atau tidak, di akhir masa kuasa Orde Baru. Terminologi *fundamentalisme* di sini, tidak berarti gerakan yang menggunakan kekerasan, namun lebih merupakan situasi maupun kondisi di mana individu maupun masyarakat masih menganggap penting terhadap fungsi dan peran agama dalam masa depan kehidupan umat manusia. Sehingga, keinginan untuk mengembalikan semua persoalan hidup umat manusia pada agama semakin terasa besar dan kuat. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan detail seputar diskursus terminologi ini, lihat Basam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New Worls Disrder* (London: University of California Press, 1998); Hasan Hanafi, *al-din wa al Tsaurah* (Cairo: Madbuli, 1998).

<sup>23</sup>Terkait dengan gerakan sosial keagamaan global, Anthony Giddens (1997) mencatat bahwa hal itu mengambil posisinya dalam 3 bentuk; transformatif (*transformative*). Model ini bersifat futuristik, jangkauannya dalam skala besar, dan penggunaan kekerasan. Contohnya adalah gerakan revolusi dan fundamentalisme agama; reformatif (*reformative*). Fokus gerakannya lebih spesifik; ketidakadilan dan ketidaksetaraan; penebusan (*redemptive*). Gerakan penyelamatan dari jalan kehidupan yang terlihat sebagai penghalang: gerakan keagamaan.

<sup>24</sup>Untuk informasi lebih detail seputar Komunitas ini, baca bab IV. Sementara itu, banyak sebutan untuk menunjuk Komunitas ini, namun oleh masyarakat sekitar, agama ini disebutnya dengan banyak *Dayak Dermayu*, *Dayak Losarang*, dan *Dayak Kerimun*. Sebutan-sebutan tersebut semuanya mengacu dan dinisbatkan pada tempat di mana agama itu lahir dan berkembang. Dengan lidah lokal masarakat sekitar biasa mengucap *Dayak Dermayu* (Kabupaten

Komunitas ini mendapatkan tekanan yang cukup kuat dari negara. Tentu, yang dimaksud dengan negara di sini adalah organ-organ yang dibuat negara untuk mengurus persoalan tertentu. Melalui *fatwa* Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kajian Badan Pengawas Kepercayaan Masyarakat (Baperkam) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menyimpulkan bahwa Komunitas itu merupakan kelompok sesat. Salah satu dasar keputusan MUI maupun Baperkam tersebut adalah *setting* ajaran Komunitas tidak mempercayai adanya Tuhan, melainkan kepada Alam.<sup>25</sup>

Merespon hal tersebut, Wardi, salah seorang penghayat Komunitas ini mengatakan:

... kalau kita dianggap sesat ya *biarin* saja. Yang penting kita tidak merugikan orang atau kelompok lain. *Lagian*, anggapan sesat tersebut hanya diumumkan lewat media koran dan radio saja. Pihak MUI tidak pernah datang ke sini. Kalau saja mereka datang ke sini, kami jelaskan ajaran Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Sighandu Indramayu Indramayu yang mengandung nilai-nilai kebenaran.<sup>26</sup>

Komunitas ini diinisiasi oleh Paهران Takmad Diningrat dan berpusat<sup>27</sup> di Blok Pintu Air, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Yang mendorong Takmad, demikian Paهران Takmad Diningrat biasa disapa, menginisiasi berdirinya Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bhumi Seghandu Indramayu yang pada awalnya dipicu oleh kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah<sup>28</sup> dan fungsi agama pada masyarakat secara

---

Indramayu), *Dayak Losarang* (Kecamatan Losarang), maupun *Dayak Krimun* (Desa Karimun). Selanjutnya, saya akan menyebutnya dengan istilah Komunitas.

<sup>25</sup>Wawancara dengan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Losarang di Kediannya di Desa Jangga, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 17 Oktober 2019, pukul 11.20.

<sup>26</sup>Wawancara dengan sesepuh penghayat Komunitas ini, bapak Wardi pada tanggal 25 Februari 2019, pukul 10.23, dan bertempat di Padepokan Komunitas.

<sup>27</sup>Belum ada satu istilah yang disepakati untuk menunjuk pusat kegiatan Komunitas ini. Diantara mereka menyebutnya dengan *padepokan*. Sementara, sebagian lagi dengan *pendopo*, *sentra*, atau *kerajaan*.

<sup>28</sup>Dari banyak informasi yang didapat dari orang lain atau hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri, banyak sekali ditemukan statemen-statemen yang dimunculkan oleh Penghayat Komunitas ini yang secara terang-terangan mengkritik kebijakan tertentu pemerintah. Lebih khusus lagi kebijakan terkait dengan kehidupan beragama di Indonesia.

umum.<sup>29</sup> Pemilihan Umum (Pemilu), misalnya, dinilai oleh Takmad sebagai arena diskriminasi penilaian kualitas manusia secara terang-terangan. Dengan memilih, itu artinya, sama dengan menganggap si A lebih baik dibanding si B. Bisa jadi sebaliknya. Di samping itu, penghayat Komunitas ini juga tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bagi mereka, manusia terlahir dari alam dengan telanjang, tanpa membawa identitas tertentu. Sehingga, manusia tidak punya hak untuk menilai, apa lagi berafiliasi pada hal-hal tertentu, termasuk juga pada agama.

Kajian seputar respon penghayat agama-agama lokal terhadap kebijakan negara pada dasarnya adalah penelitian turunan dari keseluruhan tema umum/besar relasi agama-negara. Tema penelitian ini juga sebenarnya tidak termasuk baru dalam diskursus realasi agama-negara. Menjadi baru, ketika *stressing* penelitian ini difokuskan pada tingkat respon penganut agama-agama lokal. Sampai hari ini, kebanyakan kajian relasi agama-negara, fokusnya adalah kebijakan negara. Sehingga, tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa tema penelitian seputar relasi agama-negara masih tetap *sexy* dan menarik untuk diteliti.

## B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian disertasi ini seputar usaha penghayat Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bhumi Seghandu Indramayu dalam mengkonstruks identitas diri Komunitasnya. Suatu proses mendefinisikan diri (*the self*) dan yang lian (*the others*). Sebagai identitas minoritas, yang dalam literatur kajian poskolonial disebutnya sebagai identitas kaum *subaltern*,<sup>30</sup> dalam usaha mengkonstruksi,

---

<sup>29</sup>Bagi Penghayat Komunitas ini, melihat agama sekarang ini sudah tidak lagi berfungsi sebagai pengayom masyarakat. Hal ini nampak terlihat dari perilaku pemuka agama itu sendiri yang secara terang-terangan sudah tidak lagi menggunakan etika dalam pergaulannya di tengah masyarakat. Bahkan, menurut mereka lagi, agama dijadikan alat justifikasi atas target-target hidupnya.

<sup>30</sup>Untuk informasi lebih detail seputar tema poskolonial dan *subaltern* ini lihat Henry Schwarz and Sangeeta Ray, *A Companion to Postcolonial Studies* (Oxford: Blackwell Publishing, 2005); Edward Said, *Orientalism* (New York: Vintage, 1979); Edward Said, *Culture and Imperialism* (New York: Knopf, 1993); Leela Ghandi, *Postcolonial Theory: A Critical Introduction* (Columbia: Columbia University Press, 1998); Gayatri C. Spivak, *In Other Worlds:*

merawat, dan sekaligus menguatkan mengalami semacam dinamika yang cukup serius. Sementara, secara hipotetik, perjumpaannya dengan identitas-identitas dominan di sekitarnya, identitas diri Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bhumi Seghandu Indramayu itu secara langsung mengalami penolakan yang cukup serius, tekanan yang tidak ringan, dan mengharuskan adanya proses-proses negosiasi yang cukup ketat. Sebagai identitas dominan, secara psikologis, mempunyai perasaan superior. Demikian pula sebaliknya, sebagai identitas minoritas merasa terdominasi (*dominated*) oleh yang dominan tadi.

Mendasarkan pada deskripsi di atas, rumusan penelitian disertasi ini dibangun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan besar sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan negara terhadap agama-agama lokal memengaruhi konstruksi identitas diri penghayat Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bhumi Seghandu Indramayu?
2. Seperti apa dinamikanya ketika penghayat Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bhumi Seghandu Indramayu itu melakukan negosiasi-negosiasi dengan identitas-identitas dominan di sekitarnya?

### C. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini untuk tujuan sebagai berikut; *pertama*, secara teoritis, penelitian ini didedikasikan untuk pengembangan kerja-kerja akademik, khususnya kajian-kajian seputar identitas dengan berbagai perspektifnya. Sementara secara praktis, untuk mengetahui dan mengidentifikasi fakta-fakta yang memengaruhi kebijakan negara terhadap konstruk identitas Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bhumi Seghandu Indramayu beserta respon Komunitas terhadap kebijakan tersebut. Hal ini tentu dipotret dari fenomena dan dinamika yang terjadi ketika Komunitas ini untuk pertama kalinya mengemuka di tengah-tengah masyarakat Indramayu, Jawa Barat.

---

*Essays in Cultural Politics* (New York: Methuen, 1987); Martin Lukito Sinaga, *Identitas Poskolonial Gereja Suku Dalam Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: LKiS, 2004); Benedict Anderson, *Imagined Communities* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

*Kedua*, mengetahui karakter dan pola-pola dinamika ketika penghayat Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bhumi Seghandu Indramayu itu melakukan negosiasi-negosiasi dengan identitas-identitas dominan di sekitarnya. Latar belakang sosio-politis status-status tertentu yang nempel di belakang kata agama, misalnya, agama negara, agama resmi, agama semitik, agama lokal, agama nusantara, dan lain sebagainya. Kategorisasi itu bersifat diskriminatif terhadap hak-hak dasar suatu kepercayaan dengan memunculkan subordinasi agama tertentu terhadap agama-agama lainnya. Hal ini nampak dari pola rumusan pengertian dan standarisasi agama selalu mengacu pada tradisi agama-agama mayoritas yang dapat pengakuan dari negara. Sangat sulit bagi agama-agama lokal bisa menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan agama negara tersebut.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sedikitnya ada tiga kategori penelitian yang mempunyai tema yang sama dengan disertasi ini. Kategori pertama adalah yang berkaitan dengan kebijakan negara terhadap agama-agama secara keseluruhan, baik agama-agama yang masuk dalam kategori agama negara maupun yang tidak. Kategori ini mencakup dua jenis: khusus mengkaji perundang-undangan (*legal formal*) dan karya-karya seputar kebijakan negara mengenai agama lokal. Yang termasuk dalam kategori khusus mengkaji perundang-undangan, sedikitnya ada dua karya penting yang digun sebagai sumber utama dalam penelitian ini, yaitu, pertama, buku *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil* karya Soedjito Tjokrowisastro. Buku tersebut merupakan kompilasi peraturan-peraturan terkait dengan pernak-pernik seputar kehidupan beragama di Indonesia. Karya Soedjito Tjokrowisastro ini juga bisa dikatakan berbeda dengan yang lain karena objek kajiannya yang mengkhhususkan pada kompilasi teks perundang-undangan kehidupan beragama di Indonesia. Kajian itu dimulai dari jaman pemerintahan Kolonial Belanda sampai pemerintahan Orde Baru.

Kedua adalah *Himpunan Peraturan di Bidang Keagamaan* karya Wienata Sairin. Secara garis besar, buku Wienata Sairin ini fokus kajiannya seputar kebijakan-kebijakan negara atas agama. Dalam kajiannya, Wienata memilah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial Belanda sampai pemerintahan Suharto terkait dengan peraturan seputar kehidupan beragama. *Scope* kajian buku ini dimulai sejak pemeritahan kolonial Belanda sampai dengan pemerintahan Orde Baru. Karya Wienata Sairin ini lebih merupakan kajian literature/teks. Semua peraturan yang menyangkut kehidupan beragama di Bumi Nusantara sejak jaman kolonial sampai Orde Baru.

Karya Wienata Sairin ini, ketika ditimbang dari sisi metodologinya, ia mencoba membandingkan produk-produk perundang-perundangan terkait dengan agama dan kehidupan beragama di Indonesia dengan produk perundang-perundangan lainnya dengan isu yang sama. Selanjutnya, Sairin memberikan komentar dan analisisnya pada aspek kelebihan dan kekurangan dari produk perundang-undangan tersebut. Tentu, komentar Wienata tersebut tidak melepaskan diri dari aspek legal formal hukum di Indonesia dan aspek sosio-antropologisnya. Sehingga, kajian Wienata ini terkesan lebih detail dibandingkan dengan kajian-kajian yang dibuat oleh sarjana lainnya.

Kategori *kedua* adalah karya-karya akademik seputar konstruksi identitas individu maupun kelompok. Beberapa buku yang digun terkait dengan tema penelitian disertasi ini, salah satunya, adalah hasil penelitian Bikkhu Parekh, Guru Besar Filsafat Politik di Universitas Westminster, Inggris. Hasil penelitian Parekh ini selanjutnya dibukukan dan diterbitkan pertama kalinya pada tahun 2008 oleh Penerbit Palgrave MacMillan dan diberi judul *A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World*.<sup>31</sup> Secara umum, penelitian Parekh ini dilatarbelg adanya kenyataan bahwa gelombang globalisasi sekarang ini telah memaksa etnisitas, agama, nasionalime, dan bahkan identitas individu maupun kelompok sekalipun selalu dalam ketegangan.

---

<sup>31</sup>Bikkhu Parekh, *A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World* (London: Palgrave-Macmillan, 2008).

Kondisi seperti ini dinilai oleh Parekh sebagai kondisi yang menghantarkan sistem tatanan dunia sekarang ini ke arah yang tidak stabil (*disorder*). Ketika situasi ini muncul, yang terjadi selanjutnya adalah munculnya konflik-konflik sosial baik yang berafiliasi pada identitas etnik maupun pada identitas agama sekalipun. Peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang terjadi di belahan dunia sekarang ini tidak lain dan merupakan imbas langsung dari kondisi sistem dunia yang tidak setabil (*disorder*) itu. Untuk meminimalisir dan menghilangkan situasi seperti itu, sebagai kesimpulan dari penelitian Guru Besar Filsafat Politik di Universitas Westminster, Inggris itu menawarkan beberapa pemikiran sebagai jalan keluarnya. Salah satunya adalah kebutuhan terhadap usaha yang bersifat integratif antara identitas universal manusia dengan identitas komunal tertentu. Ini artinya, kedua jenis identitas tersebut—universal dan komunal—merupakan dua macam identitas yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kedua identitas tersebut dipaksa untuk dibedakan, yang terjadi kemudian adalah ketegangan di mana situasi tersebut mendorong terjadinya semacam disabilitas tatanan dunia secara menyeluruh.

Sumber lain adalah hasil penelitian misionaris Belanda, Rita Smith Kipp, pada masyarakat Batak Karo, Sumatera Utara. Penelitian Kipp ini berlangsung dari tahun 1972 sampai 1974. Penelitian tersebut yang awalnya sebagai syarat untuk penyelesaian program doktoralnya diberi judul *Dissociated Identities: Ethnicity, Religion, and Class in an Indonesian Society*<sup>32</sup> dan diterbitkan pertamanya pada tahun 1993 oleh the University of Michigan Press, Amerika Serikat. Karya Kipp ini terhitung langka dan merupakan anti tesis dari penelitian-penelitian sebelumnya yang percaya bahwa urbanisasi, secara otomatis, meruntuhkan bangunan identitas individu maupun komunitas etnik tertentu. Bagi Kipp, hal itu tidak relevan untuk masyarakat Batak Karo. Justeru sebaliknya, urbanisasi justru semakin menguatkan identitas komunal mereka.

---

<sup>32</sup>Ratna Smith Kipp, *Disassociated Identities: Ethnicity, Religion, and Class in an Indonesian Society* (Michigan: the University Of Michigan Press, 1993).

Ini terbukti dari kegiatan-kegiatan eksklusif mereka yang berorientasi pada penguatan identitas masih terus dilakukan secara intens dan terus-menerus.

Kategori *ketiga* adalah karya-karya akademik seputar keberadaan agama-agama negara dengan agama non-negara, terutama terkait dengan dinamika relasi negara dengan agama-agama lokal secara keseluruhan. Salah satu karya yang termasuk ke dalam kategori ini adalah buku yang dieditori oleh Anas Saidi, Peneliti Senior pada Badan Riset Nasional (BRIN), *Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru*, diterbitkan pertama kalinya pada tahun 2004 oleh Penerbit Desantara, Jakarta. Buku ini, bisa dikatakan karya yang cukup komprehensif dalam memotret relasi agama-negara dari masa kolonial sampai pada masa Orde Baru. Di samping isu relasi agama-negara, buku ini juga membicarakan kasus-kasus spesifik terkait dengan isu tersebut.

Secara metodologis, penyajian buku ini dibagi ke dalam beberapa bab. Pada bab pertama buku ini dimulai dari deskripsi filosofis seputar agama itu sendiri yang merupakan dan diklaim sebagai variabel sosial. Sebagai variabel sosial, agama tentu saja bisa dikaji dalam berbagai perspektif, termasuk dalam kaca mata ilmu-ilmu sosial. Bagi penulis buku ini, agama tidak saja mempunyai dimensi teologis semata, tapi dimensi sosial juga. Dengan alasan ini, agama bisa dikatakan sebagai lembaga yang juga berdimensi sosial. Sehingga, agama dapat dikaji oleh latar belakang keilmuan berbeda.

Buku ini tidak sepi dari kritik dari kalangan tertentu yang menganggap belum melahirkan seperangkat teori dalam membongkar persolan diskriminasi negara terhadap agama-agama tertentu di Indonesia.<sup>33</sup> Akan tetapi, dalam banyak sisi, buku ini sangat membantu dalam membongkar penelitian disertasi ini. Secara umum, disamping mau membuktikan betapa diskriminatifnya kebijakan agama Orde Baru, buku ini juga mengulas sejarah kebijakan negara sampai pada era runtuhnya Orde Baru. Kebijakan negara tersebut sering sekali bersifat tidak langsung. Artinya, dalam mengambil sikapnya, negara hampir

---

<sup>33</sup>Tedi Kholidudin, *Kuasa Negara Atas Agama* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), 20.

keseluruhannya menggunakan lembaga-lembaga yang negara buat. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, tidak jarang fatwa-fatwa-nya dijadikan sandaran negara dalam mengambil keputusan tertentu.

Karya lain adalah hasil penelitian Ashutosh Varshney dengan mengambil *locus* penelitiannya di India. Fokus tema penelitian Varshney ini adalah seputar konflik antar agama di India. Lebih spesifik lagi konflik sosial keagamaan antara masyarakat Hindu dengan masyarakat Muslim. Hasil penelitian Varshney ini terbilang sangat luar biasa. Hal tersebut dibuktikan dengan diterimanya penghargaan Gregory Luebbert dari *American Political Science Association* (APSA). Selanjutnya, hasil penelitian Varshney tersebut dicetak untuk pertama kalinya pada tahun 2002 dan diberi judul *Ethnic Conflict and Civil Life: Hindus and Muslim in India*. Hasil penelitian guru besar Ilmu Politik pada Brown University, Amerika Serikat tersebut, selanjutnya, diterbitkan oleh Yale University Press. Penelitian Varshney ini merupakan karya terbaik dalam bidang kajian politik perbandingan. Fokus kajiannya seputar bagaimana identitas kewargaan antara penganut Islam dengan Hindu di India bersinergi untuk mencegah dan meredam munculnya konflik etnik maupun agama. Buku ini juga secara tidak langsung memberikan gambaran seputar kekerasan etnik dan membantu dalam memahami persoalan konflik etnis secara global dan penanganannya sekaligus.

Terakhir, hasil penelitian Abdul Syukur, guru besar Antropologi Agama pada Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung, yang diterbitkan dalam *Jurnal Agama dan Sosial Budaya UIN Sunan Gunung Djati* tahun 2014. Penelitian Syukur tersebut, yang secara metodik menggunakan cara-cara kerja etnografi, pada dasarnya ingin berargumentasi bahwa fenomena munculnya Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bhumi Seghandu Indramayu tersebut sebagai gejala sosial yang erat kaitannya dengan persoalan keagamaan. Tentunya hal itu dalam pengertian yang lebih luas. Tidak saja kaitannya dengan persoalan internal agama itu sendiri *per se*, namun

mencakup juga konsekuensi-konsekuensi logis dari pergaulannya dengan tradisi-tradisi agama lain.

Guru besar Antropologi Agama tersebut melihat bahwa fenomena mengemukanya Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bhumi Seghandu Indramayu, di banyak daerah di Indonesia di akhir-akhir masa kuasa Orde Baru itu, sebagai fenomena kebangkitan atau resistensi budaya lokal terhadap kuatnya gelombang globalisasi di berbagai bidang kehidupan umat manusia saat ini. Dari fenomena tersebut, penelitian Syukur ini pada dasarnya merupakan proposal perlunya semacam usaha merumuskan ulang orientasi dakwah (Islam) yang dinilainya sudah tidak *up to date* lagi. Dengan kata lain, Sukur menilai, fenomen muncul dan menguatnya agama-agama lokal di berbagai daerah di Indonesia dan di akhir masa kuasa rezim Orde Baru itu dianggap sebagai kegagalan dakwah Islam.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah proses pelaporan, metode penulisan disertasi ini dibagi ke dalam beberapa bab. Pada bab *pertama*, konsentrasi pelaporannya difokuskan menyuguhkan beberapa alasan dan latar belakang yang secara langsung mendorong perlu dilakukannya penelitian seputar isu dan proses-proses konstruksi identitas Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bhumi Seghandu Indramayu kaitannya dengan identitas dominan lainnya, khususnya identitas agama yang mendapatkan pengakuan negara. Di Indonesia ada ratusan agama yang secara keseluruhan dapat dikategorikan menjadi dua: agama negara dan agama non-negara.

Proses kategorisasi tersebut mendorong hadirnya semacam dinamika sosial-politik yang cukup serius. Sentimen-sentimen sosial muncul dari kedua belah pihak. Bagi agama negara, diuntungkan sebagai parameter dalam kebijakan negara. Pokok bahasan bab ini untuk melihat dinamika proses perjumpaan antara identitas Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bhumi Seghandu Indramayu dengan identitas agama negara tersebut. Pada bab ini pula

dijelaskan akar sosio-politik proses-proses pelebagaan, pelabelan, maupun kategorisasi agama-agama tertentu ke dalam agama negara dan agama non-negara. Selain kedua point tersebut, pada bagian ini juga disinggung juga persoalan-persoalan yang mendasari ketegangan hubungan antara kedua kategori agama tersebut. Bagian *kedua* laporan penelitian ini difokuskan pada eksplorasi, khususnya dalam literatur ilmu-ilmu sosial, yang relevan dengan tema dan teori identitas secara keseluruhan beserta dinamika perdebatannya. Dengan kata lain, pokok bahasan pada bagian kedua ini dikonsentrasikan untuk mendeskripsikan seputar teori identitas secara keseluruhan. Dari pra konstruksi teori identitas sampai pada teori identitas modern saat ini. Sudah barang tentu, eksplorasi tersebut mencakup juga *discourse* (diskursus) seputar bangunan teori tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar pembaca dapat memahami aspek sosio-antropologis dari diskursus seputar teori identitas tersebut.

Pada bagian kedua ini pula, pokok bahasanya diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya, bagaimana identitas individu dibangun dan dibentuk, bagaimana identitas-identitas individu tersebut berproses dan dikonstruksi menjadi identitas sosial/kolektif, dan bagaimana pula suatu identitas sosial/kolektif mengikat setiap individu. Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan pertanyaan dasar dalam mengkaji teori identitas secara komprehensif. Bagaimana bangunan suatu teori tertentu tidak terlepas dari aspek sosiologisnya. Dengan kata lain, suatu teori sosial dibangun dan merupakan kesimpulan dari fenomena sosial katika itu. Sehingga, teori tertentu, bisa jadi sudah tidak lagi *aplicable* (diterapkan) dengan situasi dan kondisi saat ini.

Pada bagian *ketiga* ini fokus bahasanya dikonsentrasikan seputar persoalan metode dan prosedur penelitian. Tema penelitian ini adalah seputar persoalan konstruksi identitas kelompok agama minoritas yang lokusnya adalah Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bhumi Segandu Indramayu dan sekaligus menggunakan metode kualitatif. Sesuai dengan tujuan dasarnya, penelitian ini berusaha mendapatkan makna dan pemahaman tertentu dan memperoleh gambaran dari realitas sosial yang kompleks. Paradigma yang digun dalam

penelitian ini adalah paradigma interpretif-konstruktifisme. Pilihan tersebut didasari dengan alasan bahwa peneliti dapat melakukan penafsiran dan bertindak sesuai dengan yang ada dalam pikiran peneliti. Dengan paradigma ini pula, peneliti bisa mengembangkan makna-makna subjektif dari informan di lapangan. Makna-makna tersebut juga dicarikan hubungannya (*corelation*) dengan yang lainnya.

Selanjutnya bagian *keempat* diprioritaskan untuk mengeksplorasi sejarah dan tumbuh-kembang Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Sighandu Indramayu secara keseluruhan. Alur deskripsi sejarah dan tumbuh-kembang Komunitas ini dimulai dari sebelum munculnya Komunitas tersebut. Dalam sejarahnya, Komunitas tersebut merupakan etape terakhir dari parjalanan sepiritual Paهران Takmad Diningrat. Dengan kata lain, kelahiran Komunitas tersebut diawali sebelumnya dengan hadirnya perguruan-perguruan silat sebagai cikal bakal lahirnya Komunitas ini.

Pada bagian *kelima* ini pokok bahasannya difokuskan pada temuan penelitian. Dengan kata lain, temuan yang dimaksudkan di sini adalah eksplorasi respon penghayat Komunitas ini terhadap poin-poin tertentu. Misalnya, respon penghayat Komunitas terhadap kebijakan Orde Baru terhadap agama-agama lokal. Di samping itu, masih dalam poin ini juga, termasuk di dalamnya adalah poin yang menyangkut dinamika relasi kehidupan negara dan agama lokal. Memang, pada bagian ini juga, tidak saja membicarakan menyangkut persoalan kehidupan beragama saja, namun aspek lain seperti respon Penghayat Komunitas ini terhadap, misalnya lagi kebijakan agama pemerintah. Bab *keenam* adalah kesimpulan dari keseluruhan deskripsi penelitian ini.